

**ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI, INTEGRITAS DAN
INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT
STUDI PADA AUDITOR INSPEKTORAT
KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh :

Try Agustami

Pembimbing : Nur Azlina Dan H. Mudrika Alamsyah Hasan

Faculty of economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : tryagustami03@yahoo.co.id

*Analysis of Influence of Competence, Integrity and Independence to Quality Audit
Study At Auditor Office Inspectorate Bengkalis Regency*

ABSTRACT

This research was conducted on Auditor Office of Inspectorate of Bengkalis Regency with the aim to know the influence of variable Competence, Integrity and Independence to Quality Audit Study At Auditor Office Inspectorate Bengkalis This research uses primary data that is data obtained from interviews and giving questionnaires to all employees Auditor Office Inspectorate of Bengkalis Regency. Secondary data obtained related to the object and organizational structure of the population in this study are all employees of the Inspectorate Auditor Office of Bengkalis Regency, amounting to 13 people and sampled. The method of analysis used in this study is multiple linear regression method. From the results of tests that have been done, Partial Test (Test-t) indicates that the variable Competence, Integrity and Independence significantly influence the Quality Audit. The result of calculation of coefficient of determination (R²) is equal to 0,711 or equal to 71,1% which means, variable of Competence, Integrity and Independence together influence to Audit Quality, while the rest 22,9% influenced by other variables not examined in research this.

Keyword : *Competence, Integrity, Independence and Quality Audit*

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus ditanggapi dengan serius dan sistematis. Segegap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good

governance dan clean government. Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan good governance pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan

tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.” Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas.

Menurut (Mardiasmo, dalam Taufiq 2010), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan

oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk mengetahui kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah, maka dilakukan audit oleh aparat pemeriksa intern pemerintah. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Lembaga inspektorat merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal (auditor internal) pemerintahan semakin meningkat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan salah satu agenda utama reformasi sektor publik di Indonesia.

Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005 dalam Efendy 2010). Boynton (dalam Efendy, 2010) menjelaskan bahwa fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Untuk dapat menjalankan fungsi ini, seorang auditor harus memiliki kompetensi, independensi dan pengalaman. Hal ini sangat penting mengingat pengelolaan keuangan pemerintah daerah banyak mendapat sorotan dengan maraknya pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Menurut Yuliani (2010) disebutkan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (quality assurance) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Menurut Boynton (dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas

dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Dalam melakukan tugasnya, salah satu fungsi APIP dalam hal ini Inspektorat provinsi/kabupaten/kota adalah melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas temuan-temuan APIP, seyogyanya temuan tersebut ditindak lanjuti oleh SKPD sebagai perbaikan, dan sekurangnya tidak lagi menjadi temuan yang sama oleh BPK. Pengawasan oleh Inspektorat berisi tentang temuan dan kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan rekomendasi terhadap temuan tersebut. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit juga memberikan informasi potensi kerugian negara yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD. Beberapa hasil audit Inspektorat tersebut ditindaklanjuti menjadi audit investigasi, kasus korupsi dan kasus pidana.

Fakta yang diperoleh terhadap opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Dalam laporannya, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Pragraf Penjelas atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2014. Hal ini karena pada audit yang dilakukan

oleh BPK mendapatkan temuan yang tidak terdeteksi oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis, temuan ini berpengaruh terhadap opini BPK terhadap LKPD. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: pengelolaan aset tetap Kabupaten Bengkalis yang belum tertib, terdapat 152 bidang tanah tidak didukung dengan Bukti Kepemilikan, aset lain-lain pada enam SKPD tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan terdapat kesalahan penganggaran pada delapan SKPD. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara yaitu: (1) Kekurangan volume pekerjaan urukan tanah boxit pada paket pekerjaan pembangunan pengembangan Fasilitas Darat Pelabuhan Pelabuhan Roro Air Putih; (2) Kekurangan volume pada 13 paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum; (3) Kekurangan bobot pekerjaan pada dua Pekerjaan Pembangunan Gedung di Dinas Pendidikan; dan (4) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak sesuai ketentuan (www.bpkriau.com)

Fenomena banyaknya temuan ini menjadikan pertanyaan apakah kualitas audit yang dilakukan oleh APIP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis, masih lemah. Seharusnya Inspektorat merupakan pihak yang pertama kali melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

seyogyanya dia akan menemukan banyak hal, sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kenyataannya BPK malah menemukan temuan-temuan yang sama dengan temuan pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2009), auditor yang kompeten adalah auditor yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan audit menurut hukum dan memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup untuk melakukan tugas audit. Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: "Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan". Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk

membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004). Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Menurut Cahyat (2004), berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah di antaranya yaitu melakukan pengawasan keuangan.

Produk audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit yang sudah ditetapkan standarnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses audit dapat dikatakan telah memenuhi syarat quality assurance apabila proses yang dijalani tersebut telah sesuai dengan standar, antara lain: standar for the professional practice, internal audit charter, kode etik internal

audit, kebijakan, tujuan, dan prosedur audit, serta rencana kerja audit (Pramono, 2003).

Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang diambil oleh pihak pemakai. Sehingga seorang auditor harus dituntut memiliki kompetensi dalam melaksanakan setiap pekerjaannya dan memiliki sikap profesional agar dapat mengurangi penyimpangan dan pelanggaran yang dapat terjadi pada proses pengauditan (Salsabila, 2011).

Rendahnya kualitas hasil audit dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Yuliani, dalam Dian 2014). Pada setiap anggaran dari perencanaan hingga penatausahaan perlu dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan realisasi anggaran yang diberikan.

Lastanti (2005:88) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas

yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sementara itu dalam artikel yang sama, Shanteau (1987) mendefinisikan keahlian sebagai orang yang memiliki ketrampilan dan kemampuan pada derajat yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan.

De-Angelo (1981) dalam Alim dkk (2007), mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada system akuntansi auditee. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. (Peraturan Kepala BPKP No. Per-211/K/JK/2010).

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan

dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. (Mulyadi, 2002). Menurut Yuliani (2010) disebutkan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (quality assurance) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk dapat memberikan jaminan seorang auditor juga harus menjunjung tinggi nilai integritas serta objektivitas.

Penelitian mengenai integritas pernah dilakukan sebelumnya, Mabruri dan Winarna (2010), dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Begitu juga hasil penelitian Ayuningtyas (2012), bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas yang dimiliki oleh auditor sector publik pada saat melaksanakan penugasan profesional auditnya akan mendorong meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan.

Selain kompetensi/keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP,

2008). Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam beberapa pernyataan berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis ?
2. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Auditor Kantor

Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

2. Untuk mengetahui pengaruh integritas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pada Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

TELAAH PUSTAKA

1. Audit

Menurut Committee of Auditing Concepts (2009) Pengertian Auditing adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti –bukti secara objektif mengenai suatu pernyataan tentang kegiatan atau kejadian ekonomis untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan.” Menurut Arens and Loebbecke (2009) pengertian auditing adalah suatu kegiatan pengumpulan dan penilaian bukti – bukti yang menjadi pendukung informasi kuantitatif suatu entitas untuk menentukan dan melaporkan sejauhmana kesesuaian antara informasi kuantitatif tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh institusi atau orang yang kompeten dan independen.

2. Kompetensi

Lastanti (2005) mendefinisikan kompetensi sebagai ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang

yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Sedangkan Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Lastanti (2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Hayes-Roth mendefinisikan keahlian sebagai pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut (Mayangsari, 2003).

3. Integritas

Menurut Sulaiman (2010) mengatakan bahwa Integritas adalah: “tentang keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, member kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup”. Menurut Sumartono (2004) bahwa integritas adalah Bersikap jujur, konsisten, komitmen, berani, dan dapat dipercaya”. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya

pengakuan dimana auditor harus menaati bentuk standar teknis dan etika, bersikap jujur dan transparan, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit serta tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang berkualitas.

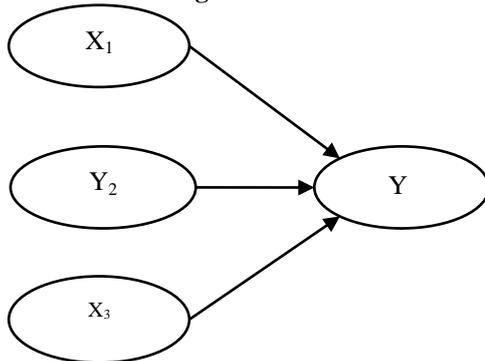
4. Independensi

pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Menurut Messier et al (2005), independensi merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu obyektivitas auditor. BPKP (2008) mengartikan obyektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat mengemukakan pendapat apa adanya.

Kerangka Penelitian

Ada pun kerangka penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber :Aryo Teguh 2013

HIPOTESIS

Berdasarkan perumusan masalah dan dihubungkan dengan teori antara variable devenden dan indeviden adalah, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis
2. Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis
3. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis

METODE PENELITIAN

Populasi adalah adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007; 23). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Auditor Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebanyak 13

orang. Analisis linier regresi berganda dipilih untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Analisis regresi linier berganda tidak hanya mengukur kekuatan pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*, melainkan juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Hubungan antara variabel-variabel tersebut akan diformulasikan ke dalam persamaan (Hasan, 2007) yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y	=	Kualitas Audit
X ₁	=	Kompetensi
X ₂	=	Integritas
X ₃	=	Independensi
a	=	Konstanta
b ₁ , b ₂	=	Koefisien Regresi
e	=	Tingkat Kesalahan (Error)

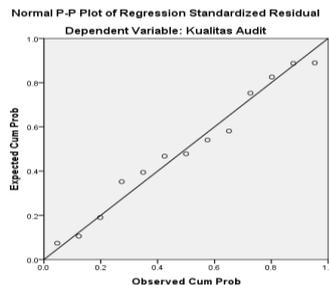
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam model regresi, variabel independent dan variabel dependen atau keduanya telah berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data, dapat dengan melihat *probability plot*. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Apabila nilai $P > 0,05$ berarti data berdistribusi normal. Pengujian normalitas residual dapat dilihat dari grafik normal P-P *Plot*. Hasil

menunjukkan grafik tersebut diketahui bahwa pencaran residual berada dalam garis lurus melintang, ini dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Gambar 2
Uji Normalitas Data



Sumber : Data Olahan, 2017

Pengujian Regresi Linear Berganda

Untuk melihat pengaruh lingkungan kerja dan motivasi intrinsik terhadap kinerja pegawai, maka digunakan analisa regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS 21.00 dapat dilihat rangkuman hasil empiris penelitian sebagai berikut :

Tabel 1
Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Konstanta
Kompetensi	.266	5,047
Integritas	.512	
Independensi	.872	

Sumber : Data Olahan, 2017

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 5.047 + 0.266X_1 + 0.512X_2 + 0.872X_3 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 5.047 Artinya adalah apabila variabel independen

diasumsikan nol (0), maka Kualitas Audit sebesar 5,047.

2. Nilai koefisien regresi variabel Kompetensi sebesar 0.266. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan Kompetensi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kualitas Audit sebesar 0.266 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel Integritas sebesar 0.512. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan Integritas sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kualitas Audit sebesar 0.512 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel Independensi sebesar 0.872. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan Independensi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kualitas Audit sebesar 0.872 dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat apakah dari setiap variabel Kompetensi, Integritas dan Independensi terhadap *Kualitas Audit*. Uji t ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka terdapat pengaruh yang signifikan (pengaruh nyata) antara variabel bebas dengan variabel terikat
- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan (pengaruh nyata) antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Tabel 2
(Uji t)

Coefficients ^a			
Model		B	t
1	(Constant)	5.047	5.994
	Kompetensi	.266	2.968
	Integritas	.512	3.738
	Independensi	.872	5.000

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kompetensi, Integritas dan Independensi Diketahui t hitung (2,968), (3.738) (5.000) > t tabel (2,262) dan Sig. Artinya variabel Kompetensi Integritas dan Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit pada Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Dan dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan kompetensi Integritas dan Independensi yang ada di Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis sangat berkompeten dimana pegawai Inspektorat memiliki pengetahuan dan keterampilan yan baik dan luas yan ditunjukkan dalam penalaman Audit.

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel bebas Integritas dan Independensi dengan variabel terikat

Kualitas Audit. Semakin besar nilai koefisien korelasinya maka menunjukkan semakin eratnya hubungan antar variabel dan sebaliknya. Pedoman untuk menentukan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

- 0,00 – 0,199: Sangat Rendah
- 0,20 – 0,399: Rendah
- 0,40 – 0,599: Sedang
- 0,60 – 0,799: Kuat
- 0,80 – 1,000: Sangat Kuat

Tabel 3
Uji Koefisien Determinasi
(R Square)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.771	0.677	0.48852

Sumber : Data olahan, 2017

Nilai R menunjukkan korelasi berganda antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam tabel 3 diketahui nilai R sebesar 0,878. Artinya adalah bahwa korelasi berganda antara variabel independen Kompetensi, Integritas dan Independensi dengan variabel dependen Kualitas Audit memiliki hubungan yang sangat kuat.

Hasil koefisien determinasi nilai R² merupakan nilai R Square dalam tabel sebesar 0,771. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen (Kompetensi, Integritas dan Independensi) terhadap variabel dependen (Kualitas Audit) adalah sebesar 77,1%, sedangkan sisanya sebesar 22,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Kompetensi, Integritas dan Independensi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit pada Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
2. Kompetensi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit pada Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
3. Integritas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit pada Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
4. Independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit pada Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, diperoleh saran penelitian sebagai berikut :

1. Dengan memperhatikan tanggapan responden mengenai kompetensi karyawan yang masuk dalam kategori baik, maka manajemen Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis hendaknya lebih memperhatikan kompetensi pegawai dengan meningkatkan pengalaman kerja pada pegawai, kemampuan menganalisis pegawai, komitmen pegawai

pada organisasi, dorongan berprestasi pada karyawan, integritas pegawai, orientasi pegawai agar tujuan organisasi tercapai dengan baik.

2. Dalam rangka meningkatkan Kualitas Audit pegawai, instansi harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi di dalam Kualitas Audit pegawai tersebut. Atasan harus lebih fokus dalam melaksanakan tugas, peningkatan keahlian pegawai dalam melaksanakan tugasnya, memberikan pelatihan dan pengembangan pada pegawai dan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam peningkatan kinerja pegawai Auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
3. Disarankan kepada atasan untuk selalu memperhatikan absensi pegawainya, memberi penghargaan atas hasil kerja yang baik, melakukan motivasi yang berkala, memberi dorongan atau semangat kepada pegawainya untuk maju dan mencapai target dalam pekerjaannya agar pegawai lebih meningkatkan kinerjanya dan menguntungkan bagi instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexa. 2010. *Mengukur Kinerja Pegawai melalui Lima Indikator*.

- <http://mgtabersaudara.blogspot.com/2010/03/mengukur-kinerja-pegawai-melalui-lima.html>. Diakses pada 16 November 2014.
- Arens, Alvin A. Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2010. *Auditing and Assurance Services and ACC Software, 13th Edition*. New Jersey :Pentice Hall
- Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangandaerah Terhadap Nilai Informasi Laporankeuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukittinggi). *Skripsi* : Universitas Negeri Padang.
- Ashari, Ruslan. 2011. Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.*Skripsi* : Universitas Hasanuddin.
- Ayura, Dies Pra. 2013. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Komitmen Organisasi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) (Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat).*Skripsi* : Universitas Negeri Padang.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga
- Cahyat, A. 2004. Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. *Governance Brief Number 3*
- Diani, Dian Irma. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Pariaman). *Skripsi* : Universitas Negeri Padang.
- Efendy, Muh. Taufiq. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Gorontalo).*Tesis*: Universitas Diponegoro.
- Fabanyo, Suryanti. 2011. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Skripsi* : Universitas Hassanudin Makassar.
- Fahrezi. 2011. Kendala-kendala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Fungsional. *Tugas Akhir*: Universitas Andalas.

- Falah, S. 2005. Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika. *Tesis tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro Semarang
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Versi 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hardi, Annesa Adriyani., Andreas. 2013. Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecakapan Profesional, Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* : Universitas Riau.
- LHP LKPD.2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*. BPK RI
- Lauso, Meifa. 2012. Pengaruh Keahlian, Independensi, Dan Etika Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Akuntansi* : Universitas Gorontalo.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Permadi, Angga Dwi. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat). *Skripsi* : Universitas Widyatama
- Puspitasari, D. I. 2012. Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*: Universitas Jember
- Queena, Precilia.P., Rohman, Abdul. 2012. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*: Universitas Diponegoro Semarang
- Rohman, A. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi* Vol. 7 No. 2. Januari.
- Rosmawati, Rida. 2011. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Skripsi* : Universitas Pendidikan Indonesia
- Rosnidah, Ida., Rawi, dan Kamarudin. 2010. Analisis Dampak Motivasi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi

- Empiris pada Pemerintah Kabupaten Cirebon). *Jurnal Akuntansi*: Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
- Salsabila, Ainia. 2011. Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit dan Gender Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal (Studi Empiris Pada Inspektorat Wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sari, Diana. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Seminar Akuntansi Nasional dan Bisnis* : Universitas Padjajaran.
- Subagjo, Rizky Alivino. 2013. Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Gerbangkertasusila). *Skripsi* : Universitas Jember.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suharyadi., Purwanto S.H. TT. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta : Salemba Empat.